UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Praktik Autocratic Legalism Dalam Pembentukan Provinsi-Provinsi Baru di Papua Pasca Revisi
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2021**
Zakki Nuzul Abdillah, Arie Ruhyanto, S.I.P., M.Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i

HALAMAN PERSEMBAHAN.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR GAMBAR.....ix

BAB I.....1

PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2. Rumusan Masalah.....4

1.3. Tujuan Penelitian.....6

1.4. Manfaat Penelitian.....6

1.5. Literature Review.....6

1.6. Autocratic Legalism.....14

1.6.1. Definisi Autocratic Legalism.....14

1.6.2 Operasionalisasi Teori Autocratic legalism.....16

1.6.3. Implikasi Autocratic Legalism Terhadap Demokrasi dan Konstitusi.....17

1.6.4. Perbedaan Autocratic Legalism dan Otoritarian Klasik.....18

1.7. Metode Penelitian.....19

1.7.1. Jenis Penelitian.....20

1.7.2. Studi Kasus.....20

1.7.3. Sumber Data Penelitian.....21

1.7.4 Teknik Analisis data.....22

1.8 Sistematika Penulisan.....22

BAB II.....24

GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....24

2.1. Papua sebagai Daerah Otonomi Khusus.....24

2.1.1 Sejarah Otonomi Khusus Sebagai Konsesi Politik.....24

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Analisis Praktik Autocratic Legalism Dalam Pembentukan Provinsi-Provinsi Baru di Papua Pasca Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2021
Zakki Nuzul Abdillah, Arie Ruhyanto, S.I.P., M.Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2.1.2 Paradoks Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus.....26
2.2. Revisi UU Otonomi Khusus Papua.....29
2.2.1 Urgensi Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.....29
2.2.2 Proses Formulasi dan Pengesahan Revisi UU Otsus Papua Tahun 2021.....30
2.3. Dinamika Politik Kewilayahan Papua.....33
2.3.1 Pemekaran Provinsi-Provinsi di Papua Pra-Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Tahun 2021.....33
2.3.2 Pemekaran Provinsi-Provinsi di Papua Pasca Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Tahun 2021.....34
BAB III.....37
REVISI UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS DAN AGENDA PEMBENTUKAN PROVINSI-PROVINSI BARU.....37
3.1. Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus: Proses, Aktor, dan Perubahan Substansi Regulasi.....37
3.1.1 Menelusuri Proses Revisi UU Otonomi Khusus: Pra-Kondisi dan Dinamika Legislasi.....37
3.1.2 Kontestasi Kepentingan dan Polarisasi Sikap dalam Proses Revisi.....47
3.1.3 Pergeseran Kewenangan dari Daerah ke Pemerintah Pusat dalam Perubahan Regulasi Revisi UU Otonomi Khusus.....49
3.2.Pemekaran Daerah sebagai Instrumen Kebijakan: Kepentingan Pemerintah dan Integrasinya dalam Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus.....55
3.2.1 Politik Pemekaran Papua sebagai Arena Kepentingan Elit dan Kontrol Pemerintah Pusat.....55
3.2.2 Problematika Pemekaran Daerah di Papua: Janji Desentralisasi, Kesejahteraan, dan Realitas Politik.....60
3.3 Dampak Pemekaran Wilayah Bagi Papua Pasca Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus.....64
3.3.1 Dampak Pemekaran terhadap Pelemahan MRP sebagai Representasi Politik Orang Asli Papua.....64
3.3.2 Dampak Pemekaran terhadap Hak Adat, Politik Elektoral, dan Tata Kelola Sumber Daya di Papua.....66

Analisis Praktik Autocratic Legalism Dalam Pembentukan Provinsi-Provinsi Baru di Papua Pasca Revisi
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2021
Zakki Nuzul Abdillah, Arie Ruhyanto, S.I.P., M.Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.3.3 Inkonsistensi Pemerintah dalam Penerapan Prinsip Otonomi Khusus Daerah... 70

BAB IV..... 73

AUTOCRATIC LEGALISM DALAM REVISI UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA..... 73

4.1 Rekonfigurasi Konstitusional..... 73

4.2 Akomodasi Legalistik..... 75

4.3 Kamuflase Fasad Demokrasi..... 77

4.4 Autocratic Legalism Sebagai Mekanisme Kontrol Teritorial..... 80

BAB V..... 81

PENUTUP..... 81

5.1 Kesimpulan..... 81

5.2 Implikasi Teoritis..... 84

5.3 Limitasi dan Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA..... 88

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Praktik Autocratic Legalism Dalam Pembentukan Provinsi-Provinsi Baru di Papua Pasca Revisi
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2021**
Zakki Nuzul Abdillah, Arie Ruhyanto, S.I.P., M.Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Dana Otonomi Khusus Papua.....27

Gambar 1.2. Proses Revisi UU Otsus..... 30

Gambar 1.3. Tabel Dokumen Proses Legislasi Pembentukan UU Otsus Papua..... 38

Gambar 1.4. Tren Peningkatan Jumlah Kekerasan yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil dari tahun 2015-2023.....43

Gambar 1.5. Tabel Perbandingan Perubahan UU Otsus Papua.....50

Gambar 1.6. Persentase Keterlibatan Aktor Dalam Wacana Kegiatan Pemekaran Papua.....63